



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
ABSTRACT	xiii
INTISARI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian	19
E. Keaslian Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Aparatur Sipil Negara dan Kuasa Aparatur Sipil Negara	30
B. Demokrasi dan Pemilihan Umum	63
C. Aparatur Sipil Negara dan Pemilihan Umum	87
BAB III LANDASAN TEORI	127
A. Teori Politik Hukum	127
B. Teori Birokrasi	135
C. Teori Netralitas Birokrasi	143
BAB IV METODE PENELITIAN	158
A. Jenis dan Metode Pendekatan	158
B. Jenis Data	160
C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	162
D. Lokasi Penelitian	163



	E. Teknik Pengumpulan Bahan dan Analisis Data	164
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	166
	A. Pergeseran Konsep Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara Dari Awal Kemerdekaan Sampai Saat ini	166
	1. Konsep Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Awal Kemerdekaan	166
	2. Konsep Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Masa Orde Baru	169
	3. Konsep Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Masa Orde Reformasi	175
	4. Konsep Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Saat ini	198
	B. Penyebab Pergeseran Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum	211
	1. Pergeseran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum dari Awal Kemerdekaan ke Orde Baru	211
	2. Pergeseran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum dari Orde Baru ke Orde Reformasi	242
	3. Pergeseran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum dari Orde Reformasi ke Saat ini	263
	Catatan Kesimpulan	311
	C. Netralitas Aparatur Sipil Negara yang Seharusnya	315
BAB VI	PENUTUP	340
	A. Kesimpulan	330
	B. Saran	342
	Daftar Pustaka	344
	Glosarium	358